

ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT



**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

**KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022/2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur dapat senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang kemudian dituangkan dalam penyusunan Perencanaan Diklat Teknis Fungsional Tahun 2022/2023.

Dokumen ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum tentang kebutuhan diklat teknis dan fungsional Tahun 2022/2023 yang merupakan rekomendasi/usulan dari organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, dokumen ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk pelaksanaan diklat teknis dan fungsional Tahun 2022/2023. Dokumen ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan diklat-diklat teknis dan fungsional, baik yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur maupun yang dikerjasamakan dengan Lembaga-lembaga Diklat yang terakreditasi melalui pengiriman peserta diklat.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Dokumen ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat kami harapkan guna penyempurnaan Dokumen di masa yang akan datang.

Semoga Dokumen ini dapat memberikan manfaat dari semua pihak yang berkepentingan.

Malili, 12 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR,



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19650110 198602 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya zaman, tuntutan akan produktivitas organisasi juga semakin tinggi. Apapun jenis organisasinya baik profit maupun non-profit secara otomatis harus mampu menghadapi kompleksitas lingkungan. Demikian halnya organisasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah, kinerjanya dituntut untuk selalu dapat melayani masyarakat beserta segala kompleksitas kebutuhannya sebagai konteks lingkungannya. Kinerja organisasi dapat dikatakan sebagai akumulasi dari kinerja individu-individu yang bekerja sama di dalamnya. Begitu pula dengan kinerja organisasi pemerintahan yang tidak bisa lepas dari kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Berkaitan dengan kinerja PNS, beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat suatu keterkaitan yang kuat antara kinerja pegawai dengan kompetensi pegawai. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa kompetensi pegawai memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai. Selain itu juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kompetensi dengan kinerja pegawai. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kinerja PNS juga ditentukan oleh kompetensi PNS yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Perlu diketahui bahwa kompetensi PNS di Indonesia masih mengalami permasalahan. Indonesia mengalami krisis PNS yang kompeten, diantaranya tidak memiliki kompetensi di bidangnya.

Kondisi tersebut menunjukan bahwa kompetensi PNS di Indonesia menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi permasalahan kompetensi PNS yakni melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat). Diklat dapat dijadikan alternatif dalam upaya pengembangan kompetensi PNS.

Secara kelembagaan, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) PNS telah dibentuk Badan Kepegawaian Negara. Lembaga ini berfungsi sebagai pengendali yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat. Selain itu terdapat instansi pembina Diklat yakni, Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat.

Permasalahan yang terjadi pada Diklat PNS yakni mengenai ketidaksesuaian antara Diklat yang diselenggarakan dengan kebutuhannya. Berbagai Diklat yang dilakukan pada PNS sebagian besar tidak memiliki relevansi terhadap jenis dan bentuk tugas pekerjaan yang mereka emban. Hal yang demikian menunjukkan Diklat PNS yang dilakukan tidak memberikan kontribusi pada organisasinya. Mengingat masih adanya permasalahan yang menjangkiti penyelenggaraan Diklat PNS di Indonesia nampaknya perlu ada formula yang tepat untuk memperbaiki penyelenggaraan Diklat PNS. Terdapat suatu metode yang dapat dijadikan sebuah solusi atas permasalahan penyelenggaraan Diklat yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Konsep tersebut dikenal dengan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) atau yang dikenal di dunia internasional sebagai Tranining Needs Analysis (TNA) yang bermuara pada penyusunan Dokumen Program Diklat atau Dokumen Human Capital Development Program (HCDP).

1.2. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan Dokumen Program Diklat/Dokumen Human Capital Depelopment Program (HCDP), sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan; dan
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan program diklat, sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang akurat untuk dijadikan masukan dalam perencanaan pengembangan SDM secara terstruktur sesuai kebutuhan prioritas;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses mencapai tujuan diklat sekaligus tujuan organisasi;
3. Memberikan saran dan pertimbangan untuk menghindari biaya (cost) yang tidak perlu dalam perencanaan pengembangan SDM melalui diklat teknis dan fungsional; dan
4. Memberikan solusi identifikasi kebutuhan sebagai rekomendasi perencanaan diklat yang benar-benar dibutuhkan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Analisis Kebutuhan Diklat (AKD)

Secara umum yang melandasi dibutuhkannya AKD yakni untuk mengidentifikasi kesenjangan yang terdapat diantara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Selanjutnya, terdapat empat poin utama yang menjadi alasan perlu dilakukannya AKD sebelum menyusun program Diklat, antara lain untuk mengidentifikasi permasalahan spesifik dalam organisasi, untuk memperoleh dukungan dalam manajemen, untuk menghasilkan data sebagai bahan evaluasi, serta untuk menentukan keuntungan dan kerugian dari sebuah Diklat. Oleh karena itu, dalam konteks Diklat PNS, mindset harus selalu difokuskan pada suatu kaidah bahwa langkah paling utama dalam penyusunan program Diklat PNS adalah kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD). AKD memiliki kaitan yang sangat erat dengan perencanaan Diklat.

Kebutuhan Diklat dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat kompetensi yang diharapkan dengan tingkat kompetensi yang saat ini dimiliki oleh PNS. Berdasarkan hal tersebut dan beberapa fakta teoritis maupun empiris yang telah dipaparkan di atas, dapat diambil sebuah arti penting bahwa AKD PNS mutlak diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi suatu Diklat guna mendukung peningkatan kompetensi PNS di Indonesia yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kinerja dan produktifitas organisasi pemerintah di Indonesia.

Pelaksanaan AKD PNS tentu tidak bisa terlepas dari dukungan pemerintah daerah. Sebagai wujud desentralisasi kepegawaian, maka pemerintah daerah sudah saatnya melaksanakan AKD sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan program Diklat PNS. Sangat perlu untuk mengamati kondisi terkait akan kinerja maupun kompetensi, kebutuhan Diklat dan jenis Diklat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan Diklat PNS di Lingkungan Pemerintahan. Sehingga dapat mengidentifikasi akan kebutuhan dalam hal peningkatan kinerja maupun kompetensi, menentukan kebutuhan Diklat dan menentukan jenis Diklat yang memenuhi kebutuhan Diklat PNS.

Analisis kebutuhan diklat atau yang juga dikenal dengan *Training Need Analysis (TNA)* merupakan tahapan pertama yang perlu dilakukan sebelum mengadakan program maupun kegiatan pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang dilakukan, maka Dokumen Program Diklat/Dokumen *Human Capital Development Program (HCDP)* dapat disusun sebagai rekomendasi kegiatan yang akan dijalankan selanjutnya.

2.2. Human Capital Development Program (HCDP)

Konsep Manajemen Aparatur Sipil Negera (ASN) pada intinya didasarkan pada sebuah konsep besar yakni, manajemen sumber daya manusia (MSDM), namun dikontekstualisasikan ke dalam ranah profesi manusia sebagai Aparatur Sipil Negera (ASN). Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan kegiatan pengelolaan SDM yang meliputi rekrutmen yang termasuk didalamnya kegiatan penarikan dan seleksi sumber daya manusia (rekrutmen), pembinaan, pelatihan, pemeliharaan/perlindungan, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia.

Peraturan perundang-undangan juga telah mengatur manajemen ASN, termasuk di dalamnya Manajemen PNS dan juga Manajemen PPPK yang termuat dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Perlu diketahui bahwa manajemen ASN di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut telah menganut sistem merit, artinya kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kepada kualifikasi kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Kegiatan pengelola SDM dalam suatu organisasi memiliki fungsi pokok yang sama dalam fungsi manajemen. Manajemen ASN yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam konteks pemerintahan.

Pendidikan dan pelatihan adalah unsur utama dalam mengembangkan kemampuan pegawai. Kegiatan pendidikan diberikan untuk meningkatkan pengetahuan yang akan meningkatkan kinerja pegawai. Desain pelatihan yang sangat kompleks diberikan untuk membantu pegawai dalam mempelajari keterampilan baru yang akan meningkatkan kinerja mereka. Pegawai yang terampil dan berkompetensi sesuai dengan tugas dan pekerjaannya akan mampu membantu organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.

Informasi kebutuhan diklat akan membantu menentukan prioritas jenis diklat yang akan dilakukan, sehingga akan membantu dalam menentukan jadwal, anggaran dan sumber daya lainnya. Hal ini juga dapat dilakukan untuk meminimalisir diklat-diklat yang tidak diperlukan. Di samping itu, menjadi landasan kegiatan selanjutnya seperti pemilihan metode pelatihan yang tepat, biaya pelatihannya tidak murah, sehingga apabila pelatihan tidak sesuai dengan kebutuhan, selain tidak meningkatkan kemampuan organisasi juga akan menghabiskan banyak biaya. Selanjutnya dikatakan rumit dan sulit sebab perlu mendiagnosis kompetensi organisasi pada saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan kecenderungan perubahan situasi lingkungan yang sedang dihadapi dan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.

Kondisi diperlukannya AKD bagi suatu organisasi, sebagai berikut :

1. Adanya ketidaksesuaian antara standar kinerja yang sudah ditentukan dengan kinerja dan prestasi kerja pegawai yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal pegawai;
2. Adanya kebijakan baru dari organisasi baik dalam hal sasaran, produk baru yang dihasilkan dan pasar baru yang menjadi tujuan;
3. Adanya struktur kerja baru sebagai upaya pemekaran atau perampangan usaha;
4. Adanya kebijakan modernisasi dibidang manajemen, sarana dan prasarana; dan
5. Adanya undang-undang maupun peraturan pemerintah baru yang menuntut perubahan pada organisasi.

Analisis Kebutuhan Diklat dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja aktual dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dimaksud dalam kebutuhan pada analisis kebutuhan diklat ini adalah kesenjangan kinerja.

Kesenjangan kinerja dalam hal ini adalah perbedaan antara perbuatan, pengetahuan, dan perasaan dengan apa yang seharusnya diperbuat, seharusnya diketahui dan seharusnya dirasakan. Perbuatan, pengetahuan, dan perasaan tersebut merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh pegawai itu sendiri. Oleh karena itu kebutuhan dapat diketahui dari adanya kondisi belum tercapainya suatu situasi berdasarkan ketentuan kerja yang dipersyaratkan bagi suatu jabatan dalam organisasi.

Beberapa potensi yang memunculkan kesenjangan antara kinerja aktual dan standar kinerja di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Pegawai baru karena proses rekrutmen, mutasi dan promosi. Pegawai baru dengan sebab tersebut sering mengalami kekurangan pemahaman terhadap tugas barunya;
2. Kebijakan baru yang berimplikasi pada perubahan standar kinerja baik itu prosedur maupun penambahan tanggung jawab baru;
3. Usia produktif kerja yang berpengaruh terhadap pencapaian target kinerja pegawai;
4. Perubahan Strategi Organisasi yang memiliki konsekuensi terhadap perubahan proses pencapaian tujuan unit kerja dan kualifikasi SDM yang diperlukan.
5. Implementasi konsep the right man on the right place yang belum maksimal dikarenakan masih adanya penerapan spoil system recruitment dan belum adanya SDM yang sesuai dengan kebutuhan jabatan di beberapa unit kerja.

Dalam melakukan analisis kesenjangan kerja diperlukan proses identifikasi akar masalah dari kesenjangan antara kinerja yang diharapkan dengan kinerja yang sesungguhnya.

Berikut adalah sebab-sebab munculnya kesenjangan kinerja :

1. Tidak adanya kesempatan bagi pegawai untuk melakukan tugas;
2. Tidak adanya kemauan dan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas;
3. Tidak adanya pengetahuan terkait dengan tata cara mengerjakan tugas.

Akar permasalahan kesenjangan kinerja yang terjadi pada Unit Kerja di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- a. Faktor individu
- b. Kemampuan dan keterampilan
- c. Latar belakang pendidikan
- d. Demografi (jenis kelamin, usia, ras dan keragaman budaya)

Identifikasi Kebutuhan Diklat berbasis kesenjangan kerja unit kerja ini merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja aktual dengan standar kinerja, dan identifikasi akar permasalahan kesenjangan. Dari hasil identifikasi tersebut maka dapat diambil keputusan jenis-jenis Diklat yang dibutuhkan oleh Unit Kerja pengguna Diklat. Jenis diklat yang diputuskan berdasarkan identifikasi tersebut akan menghasilkan jenis diklat yang bersifat untuk pengembangan organisasi, jabatan, maupun individu. Keberadaan hasil analisis kebutuhan diklat ini akan dapat memudahkan penyelenggara atau pengelola Diklat dalam menentukan program- program Diklat yang dibutuhkan oleh Unit Kerja pengguna Diklat.

BAB III

PERENCANAAN DIKLAT

3.1. Rekomendasi Kebutuhan Diklat Teknis Fungsional Tahun 2022

No	OPD	Kebutuhan Diklat	Kebutuhan Peserta (Orang)
1	Inspektorat Kabupaten	A. Diklat Teknis/Substansi (APIP, Auditor, P2UPD) 1) Manajemen Pengawasan 2) Probity Audit 3) Audit Pengadaan Barang dan Jasa 4) Penyusunan Kertas Kerja Audit 5) Audit Berbasis Resiko 6) Reviu RKA Pemda 7) Audit Kinerja Pemda 8) Penilaian Angka Kredit JFA B. Diklat Fungsional (Pembentukan dan Penjenjangan) 1) Pembentukan Auditor Ahli 2) Penjenjangan Auditor 3) Pembentukan P2UPD Ahli 4) Penjenjangan P2UPD	5 2 1 2 4 4 2 3 2 1 2 2
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	1) Diklat dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 2) Diklat Teknis Bendahara 3) Diklat Teknis Administrasi Kepegawaian 4) Diklat Administrasi/Kearsipan Perkantoran Berbasis IT 5) Diklat Teknis Tata Naskah Dinas 6) Diklat Laporan Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah 7) Diklat Teknis Pengurus dan Penyimpan Barang (BMN) Dinas 8) Diklat SIMDA Keuangan 9) Diklat Teknis Akuntansi Berbasis Akrua	2 1 2 3 2 2 4 3 2
3	Dinas Lingkungan Hidup	1) Manajemen Kepegawaian 2) Analisis Jabatan 3) Arsip Dinamis 4) Pengelolaan Aset Daerah 5) Asesor/Penilai Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 6) Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup (PPLH) 7) Fungsi Pengendalian Pencemaran 8) Penyusunan Amdal 9) Dasar-Dasar Amdal 10) Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 11) Pengelolaan Limbah Plastik (Plastik Kresek) untuk Daur Ulang	1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2
4	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

1.	Diklat Teknis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu Bagi Operator	2
2.	Bimtek Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal (Daya Saing Indonesia Dan Kemudahan Berusaha, Perizinan Berusaha)	2
3.	Bimtek Pengelola Sistem Informasi Ketenagakerjaan	
4.	Diklat Sistem Online Single Submission (OSS)	2
5.	Bimtek Mekanisme Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	2
6.	Bimtek Pedoman Umum Penyusunan APBD dan Implementasi Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	2
7.	Bimtek Pedoman Penyusunan Sinkronisasi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD terhadap Pencapaian Percepatan Pembangunan Daerah dan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja	2
8.	Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD Serta Tugas dan Tanggung Jawab Bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Keuangan	
9.	Bimtek Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Pemerintah)	2
10.	Bimtek Tatacara Penatausahaan dan Penyusunan SPJ/LPJ Bendahara	
11.	Bimtek Pedoman Pengelolaan Aset dan Inventaris Barang Milik Daerah serta Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah	2
12.	Bimtek Penyusunan Renstra SKPD dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi	
13.	Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)	2
14.	Bimtek Pengelolaan Aset Serta Tatacara Penilaian dan Penghapusan Aset	2
15.	Bimtek Tatacara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Dalam Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah	2
16.	Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Teknik menghadapi Audit BPK	2
17.	Bimtek Pedoman Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	
18.	Bimtek Manajemen Arsip dan Persuratan Berbasis Teknologi	2
		2
		2
		2
		2

		Informasi dan Implementasinya Pada SKPD dan Pemerintah Daerah	
		21) Bimtek Tatacara Penilaian, Penghapusan dan Akuntansi Aset (BMD)	2
		22) Bimtek Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa	2
		23) Bimtek Tatacara Penyusunan dan Penentuan Jumlah Kebutuhan dan Jenis Jabatan PPPK dan PNS pada OPD	
		24) Bimtek Implementasi PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Penyusunan Standar Teknis Kegiatan SKP	2
			2
		1) Diklat Pelatihan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	
		2) Diklat Petugas Registrasi	25
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1) Manajemen Penanggulangan Bencana	
		2) Pedoman Penatausahaan keuangan Pemda	100
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3) Pedoman Pengelolaan Barang dan Aset Pemerintah Daerah dan Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	5
		4) Pedoman Penyusunan LPPD pada SKPD	3
		5) Rencana Kontingensi	
		6) Penanganan Darurat Bencana	
		7) Jitupasna	3
		1) Bimtek/Diklat Pengenalan Perpustakaan	3
		2) Bimtek/Diklat Kearsipan	20
		3) Bimtek/Diklat Manajemen Perpustakaan	4
7	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4) Bimtek/Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Inpassing	3
		5) Bimtek/Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Inpassing	3
		6) Bimtek/Diklat Tata Cara Penyusunan LAKIP	3
		7) Bimtek/Diklat Standar Operasional dan Prosedur (SOP)	2
		8) Bimtek/Diklat Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan	2
		9) Bimtek/Diklat mengenai Penilaian Prestasi Kerja (PPK) PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	2
		10) Bimtek/Diklat Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja bagi PNS	5
		11) Bimtek/Diklat Pengelolaan Jabatan Fungsional Umum	5
		12) Bimtek/Diklat Administrasi Perkantoran	2
			2
			2

		13) Bimtek/Diklat Peningkatan Keterampilan serta Sikap bagi PNS	2
		14) Bimtek/Diklat Penyusunan Evaluasi Jabatan (EVJAB)	2
		15) Bimtek/Diklat Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	2
		16) Bimtek/Diklat Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	
		17) Bimtek/Diklat Kearsipan Administrasi	2
		18) Bimtek/Diklat Pengadaan Barang Dan Jasa	3
			2
8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1) Diklat Perbanyak Vegetatif Tanaman Perkebunan	
		2) Diklat Pengelolaan Tata Guna Air	30
		3) Diklat Pengendalian Penyakit pada Ternak	30
		4) Diklat Pasca Panen Jambu Mete	30
		5) Diklat Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Sayuran	30
		6) Diklat Pengelolaan dan Pengembangan Minyak Kelapa	30
		7) Diklat Pengelolaan Pakan Ternak	
		8) Diklat Survei Ubinan	30
		9) Diklat Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan dan Hortikultura	30
		10) Diklat Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Perkebunan	12
		11) Diklat Inseminasi Buatan (IB)	5
		12) Diklat Pemeriksaan Kebuntingan (PKB)	
		13) Diklat Asisten Teknis Reproduksi (ATR)	5
		14) Diklat Paramedis	5
		15) Diklat Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	5
		16) Diklat Penanganan Panen dan Pasca Panen Komoditi Perkebunan	5
		17) Diklat Penyusunan Data Statistik Perkebunan	5
		18) Diklat Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan	20
		1) Diklat Fungsional Guru	15
		1) Diklat Pengelolaan Arsip Berbasis Elektronik	2
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2) Diklat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	136
		3) Diklat Teknis Penilaian Aset/Barang Daerah	
10	Dinas Sosial	4) Diklat Penyusunan SKP	1
		5) Diklat Sistem Manajemen Kinerja PNS dan Penilaian Kinerja PNS	2
		6) Diklat Penyusunan PERDA bagi SKPD	2
		7) Diklat Penyusunan Anjab dan ABK	1
			2
			1
			2

		8) Diklat Pengelolaan Data PMKS/PSKS	2
		9) Diklat penyusunan Laporan Keuangan	2
		10) Diklat Penyusunan Renstra	1
		11) Diklat Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD	1
11	BKAD	1) Diklat Keuangan Daerah	2
		2) Diklat Pengelolaan Keuangan	2
		3) Diklat Pengelolaan Pajak Daerah	2
12	BAPPELITBANGDA	1) Diklat Perbendaharaan	2
		2) Diklat Analis Studi Pembangunan	2
		3) Diklat Manajemen Perencanaan Sosial	1
		4) Diklat Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2
		5) Diklat tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2
		6) Diklat Pengelolaan dan Analisa Data	2
		7) Diklat Teknis Penyusunan Proposal Penelitian	1
		8) Diklat Teknis Penulisan Ilmiah	1
		9) Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama	2
		10) Diklat Dasar-dasar AMDAL	2
		11) Diklat Perencanaan dan Penganggaran	3
		12) Diklat Perencanaan dan Penyusunan Program Berbasis Kinerja	2
		13) Diklat Fungsional Perencana Ahli Muda	2
		14) Diklat Fungsional Perencana Ahli Pertama	4
		15) Diklat LAKIP	2
		16) Diklat Pelayanan Berbasis Elektronik	2
Total		131	828

3.2.
Rekomendasi Kebutuhan Diklat Teknis Fungsional Tahun 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JENIS DIKLAT	KEBUTUHAN PESERTA (ORANG)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Teknis	
		1 Bimtek Kapasitas Aparat tentang Intelijen	2
		2 Bimtek Rensta	4
		3 Bimtek Laporan Keuangan	5
		4 Bimtek Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2
		5 Diklat Pendidikan Politik	3
		6 Bimtek Ormas & LSM	3

2	Dinas Lingkungan Hidup	1	Manajemen kepegawaian	1
		2	Analisis Jabatan	2
		3	Arsip dinamis	1
		4	Pengelolaan aset daerah	1
		5	Asesor / penilai pelaksanaan reformasi birokrasi	2
		6	Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup (PPLH)	2
		7	Fungsi pengendalian pencemaran	1
		8	Penyusunan Amdal	1
		9	Dasar-dasar Amdal	1
		10	Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	2
		11	Pengelolaan limbah plastik (plastik kresek) untuk daur ulang	2
3	Dinas Pariwisata	Teknis		
		1	Diklat keuangan	10
		2	Diklat SKP	2
		3	Diklat barang/jasa	4
		4	Diklat kepegawaian	17
4	Dinas Kesehatan	Teknis		
		1	Diklat penyusunan Renstra OPD	2
		2	Diklat pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)	1
		3	Diklat penyusunan laporan keuangan (OPD)	1
		4	Diklat pengelolaan keuangan daerah dan proses akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara pengeluaran	2
		5	Diklat tata cara penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah	1
		6	Diklat administrasi keuangan dan perencanaan bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara	8
		7	Diklat evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1
		8	Pelatihan <i>Antenatal Care</i> (ANC)	6
		9	Pelatihan ACLS	4
		10	Pelatihan BCLS	6
		11	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	6
		12	Pelatihan manajemen Puskesmas	6
		Fungsional		
		1	Diklat jabatan fungsional Dinkes Administrasi Kesehatan	2

	2	Diklat jabatan fungsional Sanitarian Ahli	4
		Diklat jabatan fungsional promosi kesehatan ahli	3
	3	Diklat jabatan fungsional nutrisisionis ahli	2
	4	Diklat jabatan fungsional Epidemiologi ahli	2
	5	Diklat jabatan fungsional Bidan Ahli	2
5 Dinas Sosial		Teknis	
	1	Diklat pengadaan barang dan jasa	2
		Diklat dan ujian pengadaan barang/jasa pemerintah	2
	3	Diklat teknis penilaian aset/barang daerah	2
	4	Diklat penyusunan SKP	1
	5	Diklat sistem manajemen kinerja PNS dan penilaian kinerja PNS	2
	6	Diklat teknis penyusunan PERDA bagi SKPD	1
	7	Diklat penyusunan Anjab dan ABK	2
	8	Diklat penyusunan Laporan Keuangan	2
	9	Diklat penyusunan RENSTRA	2
	10	Diklat penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD	1
		Fungsional	
	1	Diklat pengelolaan data PMKS/PSKS	2
	2	Diklat pengelolaan arsip berbasis elektronik	2
	3	Diklat analisis kepegawaian	2
6 Dinas Kelautan dan Perikanan		Teknis	
	1	Diklat pengadaan barang dan jasa	2
	2	Diklat pengelolaan BMN	2
	3	Diklat perencanaan penganggaran	2
	4	Diklat keuangan	2
	5	Diklat Analisis Jabatan	2
	6	Diklat Manajemen ASN	2
	7	Diklat Kearsipan	2
	8	Diklat Tata Naskah Dinas	2
	9	Diklat Administrasi Kepegawaian	2
	10	Diklat Penyusunan Kerja	2
7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		Teknis Bidang Sumber Daya Air	
	1	Perencanaan teknis bendungan	7
	2	Perencanaan teknis embung	5
	3	Perencanaan teknis sungai	5

4	Perencanaan teknis bangunan pantai	5
5	Perencanaan teknis air tanah	5
6	Perencanaan teknis air baku	5
7	Perencanaan teknis hidrologi dan alokasi air	2
8	Perencanaan teknis irigasi	2
9	Pengawasan mutu pelaksanaan pekerjaan irigasi	1
10	Pengawasan mutu pelaksanaan pekerjaan sungai	1
11	Pengawasan mutu pelaksanaan pekerjaan bendungan	1
12	Pengawasan mutu pelaksanaan pekerjaan pantai	1
13	Pengawasan pelaksanaan air baku tingkat dasar	1
14	Operasi dan pemeliharaan irigasi	2
15	Penanggulangan bencana banjir	3
16	Pengelolaan sumber daya air terpadu (PSDAT)	4
Bidang Bintek dan Peralatan		
1	Pelatihan sistem manajemen K3	2
2	Pelatihan estimasi biaya konstruksi	2
3	Pelatihan penjamin mutu beton pada pelaksanaan konstruksi jalan/jembatan	2
4	Perencanaan anggaran	4
Bidang Cipta Karya		
1	Pengelolaan pelayanan sistem air limbah setempat-A	1
2	Pengadaan barang dan jasa pemerintah	2
3	Pengawasan pekerjaan konstruksi	2
4	Estimasi biaya konstruksi	2
5	Pelatihan dasar teknis bidang konstruksi	2
6	Perencanaan teknis terinsi (DED) SPAM	2
7	Pengawasan konstruksi SPAM	2
8	Penyelenggaraan SPAM (Tk. Dasar 2)	2
9	Pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara	2
10	Bangunan gedung hijau	2
11	Sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) E-Learning	2
12	Pengawasan pekerjaan konstruksi	2
13	Hukum kontrak konstruksi	2

8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	Sistem informasi pemetaan untuk pengembangan infrastruktur wilayah	2
		15	Kepemimpinan Tingkat III	1
		Bidang Penataan Ruang		
		1	Pelatihan dasar pemetaan ARC.GIS	5
		2	Tingkat Lanjutan Pemetaan ARC.GIS	3
		Fungsional		
		1	SMK3 Konstruksi (sertifikasi ahli muda K3 Konstruksi	5
		2	Manajemen infrastruktur	5
		3	Manajemen konstruksi	5
		Teknis		
		1	Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama : Substansi OSS	10
		2	Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan : Substansi OSS	10
		3	Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Sektorial : Substansi OSS	11
		4	Diklat promosi di Bidang Penanaman Modal	6
		5	Conferences dan discusion	4
		6	Couching and Conseling	1
		7	Job Rotation Transfer	1
		8	Apprenticehip	1
		9	Job Instruction Training	1
		10	Diklat teknis pengoperasian, pemeliharaan dan pengelolaan PLTS	5
		11	Diklat teknis perencanaan dan pembangunan PLTS terpusat	2
		12	Diklat teknis pemasangan dan pemeliharaan Solar Home Sistem (SHS)	2
		13	Diklat teknis evaluasi perencanaan PLTS terpusat	2
		14	Diklat teknis uji lain operasi PLTS	2
		15	Diklat penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	2
		16	Diklat optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Daerah	2
		17	Diklat teknis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpadu bagi operator dan atau pengelola	2
		18	Bimtek pelayanan terpadu satu pintu Bidang Penanaman Modal (Daya Saing Indonesia dan Kemudahan Berusaha, Perizinan Berusaha)	2

19	Bimtek Pengelola sistem informasi ketenagakerjaan	2
20	Diklat sistem online single submission (OSS)	2
21	Bimtek mekanisme penyusunan rencana strategis perangkat daerah	2
22	Bimtek pedoman umum penyusunan APBD dan implementasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah	2
23	Bimtek pedoman penyusunan dan sinkronisasi RPJD, RPJMD, RENSTRA SKPD dan RKPD terhadap pencapaian percepatan pembangunan daerah dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	2
24	Bimtek rekonsiliasi dan verifikasi terhadap laporan pertanggung jawaban bendahara SKPD serta tugas dan tanggungjawab bagi bendahara penerima dan bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan daerah	2
25	Bimtek pedoman penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur (SOP) bagi pemerintah daerah	2
26	Bimtek tatacara penatausahaan dan penyusunan SPJ/LPJ bendahara	2
27	Bimtek pedoman pengelolaan aset dan inventaris barang milik daerah serta penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah	2
28	Bimtek penyusunan renstra SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	2
29	Bimtek penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (RKA-SKPD)	2
30	Bimtek pengelolaan aset serta tatacara penilaian dan penghapusan aset	2
31	Bimtek tatacara penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah	2
32	Bimtek pengelolaan keuangan dan teknik menghadapi audit BPK dalam rangka opini WTP	2
33	Bimtek pedoman penyusunan SKP	2

		34	Bimtek manajemen arsip dan persuratan berbasis teknologi informasi dan implementasinya pada SKPD dan pemerintah daerah	2
		35	Bimtek tatacara penilaian, penghapusan dan akuntansi aset/BMD menuju opini WTP	2
		36	Bimtek sosialisasi perpres no.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dan penyusunan dokumen	2
		37	pengadaan barang/jasa Bimtek tatacara penyusunan dan penentuan jumlah kebutuhan dan jenis jabatan PPPK dan PNS pada OPD dan Pemda sesuai anjab dan ABK	2
		38	Bimtek implementasi PP No.11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan penyusunan standar teknis kegiatan SKP	2
9	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pengembangan SDM		Teknis	
		1	Bimtek Laporan Keuangan	2
		2	Bimtek RENSTRA	2
		3	Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Penilaian Kinerja Pegawai SKP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019	2
			Bimtek Kearsipan	
		4		2
		5	Bimtek pengembangan kompetensi penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan SPM di daerah	2
10	Satpol PP & Damkar		Teknis	
		1	Diklat penyelamatan (Fire Rescue)	10
		2	Diklatsar Pemadam Tk.I	30
		3	Diklat Inspektur Kebakaran	2
		4	Diklat Investigasi Kebakaran	2
		5	Diklat Teknik Penyuluhan Kebakaran	2
		6	Diklat Penyidik PNS	4
		7	Diklat Manajemen Penyidikan	2
		8	Diklat Intelejen	5
		9	Pembinaan Kelinmasan	50
		10	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	10
			Pelatihan manajemen dan	
		11		40
			juknis Pos Kamdes Pelatihan PBB dan Bela Diri	
		12		20
			Anggota Linmas	
		13	Simulasi anggota Sat Linmas dalam penegakan keamanan dan ketertiban saat terjadi bencana	60

	14	Bimtek analisis jabatan bagi PNS Diklat penilaian prestasi kerja	2	
	15	PNS dan penyusunan sasaran kerja pegawai	2	
	16	Diklat perbendaharaan	2	
	17	Diklat Aplikasi Simda Keuangan	2	
	18	Diklat aplikasi Simda BUMD	2	
	19	Diklat penyusunan Laporan Keuangan	2	
		Fungsional		
	1	Diklat Fungsional Satpol PP	30	
	2	Diklat Fungsional Damkar	30	
	3	Diklat Fungsional PPNS	6	
11	Inspektorat	Teknis		
	1	Manajemen pengawasan	5	
	2	Probity audit	2	
	3	Audit pengadaan barang dan jasa Penyusunan kertas kerja	1	
	4	audit	2	
	5	Audit berbasis resiko	4	
	6	Reviu RKA Pemda	4	
	7	Audit kinerja Pemda	2	
	8	Penilaian Angka Kredit JFA	3	
		Fungsional		
	1	Pembentukan auditor ahli	2	
	2	Penjenjangan auditor	1	
	3	Pembentukan P2UPD Ahli	2	
	4	Penjenjangan P2UPD	2	
	5	Diklat Fungsional P2UPD Madya	2	
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Teknis		
	1	Pengendalian Hama Terpadu pada Tanaman Pangan dan Perkebunan	30	
	2	TOT Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan	30	
		Fungsional		
	1	Diklat alih kelompok	2	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Diklat pelatihan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)	25
	2	Diklat petugas registrasi	100	
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Manajemen penanggulangan bencana	5
	2	Pedoman penatausahaan keuangan Pemda	3	
	3	Pedoman pengelolaan barang dan aset Pemerintah Daerah dan penerapan sistem	3	

		akuntansi pemerintah berbasis akrual	
	4	Pedoman penyusunan LPPD pada SKPD	3
	5	Rencana Kontingensi	3
	6	Penanganan Darurat Bencana	20
	7	Jitupasna	4
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1 Diklat Pengenalan Perpustakaan	3
	2	Diklat Kearsipan	3
	3	Diklat manajemen Perpustakaan	3
	4	Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Inspassing	3
	5	Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Inspassing	2
	6	Diklat tata cara penyusunan LAKIP	2
	7	Diklat standar operasional dan prosedur (SOP)	2
	8	Diklat tata cara penyusunan Laporan Keuangan	5
	9	Diklat mengenai penilaian prestasi kerja (PPK) PNS dan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	5
	10	Diklat standar pelayanan penggajian dan tunjangan kinerja bagi PNS	2
	11	Diklat pengelolaan jabatan fungsional umum	2
	12	Diklat administrasi perkantoran	2
	13	Diklat peningkatan keterampilan serta sikap bagi PNS	2
	14	Diklat penyusunan evaluasi jabatan (EVJAB)	2
	15	Diklat analisis jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	2
	16	Diklat penyusunan standar kompetensi jabatan	2
	17	Diklat kearsipan administrasi	3
	18	Diklat pengadaan barang dan jasa	2
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1 Diklat Perbanyak Vegetatif Tanaman Perkebunan	30
	2	Diklat pengelolaan tata guna air	30
	3	Diklat pengendalian penyakit pada ternak	30
	4	Diklat Pasca Panen Jambu Mete	30
	5	Diklat pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) sayuran	30
	6	Diklat pengelolaan dan pengembangan minyak kelapa	30

	7	Diklat pengelolaan pakan ternak	30
	8	Diklat Survei Ubinan	12
	9	Diklat pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman pangan dan hortikultura	5
	10	Diklat pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman perkebunan	5
	11	Diklat Inseminasi Buatan (IB)	5
	12	Diklat pemeriksaan kebuntingan (PKB)	5
	13	Diklat asisten teknis reproduksi (ATR)	5
	14	Diklat paramedis	5
	15	Diklat pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	20
	16	Diklat penanganan panen dan pasca panen komoditi perkebunan	20
	17	Diklat penyusunan data statistik perkebunan	15
	18	Diklat pengawasan benih tanaman perkebunan	2
17 Bappelitbangda	1	Diklat keuangan daerah	2
	2	Diklat Pengelolaan Keuangan	2
	3	Diklat Pengelolaan Pajak Daerah	2
	4	Diklat Perbendaharaan	2
	5	Diklat Analisis Studi Pembangunan	2
	6	Diklat Manajemen Pemerintahan	1
	7	Diklat Manajemen Perencanaan Sosial	1
	8	Diklat Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2
	9	Diklat tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2
	10	Diklat Pengelolaan dan Analisa Data	2
	11	Diklat Teknis Penyusunan Proposal Penelitian	1
	12	Diklat Teknis Penulisan Ilmiah	1
	13	Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama	2
	14	Diklat Dasar-dasar AMDAL	2
	15	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	3
	16	Diklat Perencanaan dan Penyusunan Program Berbasis Kinerja	2
	17	Diklat Analisis Jabatan	2
	18	Diklat Manajemen Kesekretariatan	2

19	Diklat Kearsipan	2
20	Diklat Tata Naskah	2
21	Diklat Kehumasan	2
22	Diklat LAKIP	2
23	Diklat Pelayanan Berbasis Elektronik	2

3.3. Rekomendasi Kebutuhan Diklat Teknis Fungsional Tahun 2023

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	JENIS DIKLAT	KEBUTUHAN PESERTA (ORANG)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Teknis	
		1 Bimtek Kapasitas Aparat tentang Intelijen	2
		2 Bimtek Renstra	4
		3 Bimtek Laporan Keuangan	5
		4 Bimtek Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	2
		5 Diklat Pendidikan Politik	3
		6 Bimtek Ormas & LSM	3
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1 Manajemen kepegawaian	1
		2 Analisis Jabatan	2
		3 Arsip dinamis	1
		4 Pengelolaan aset daerah	1
		5 Asesor / penilai pelaksanaan reformasi birokrasi	2
		6 Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup (PPLH)	2
		7 Fungsi pengendalian pencemaran	1
		8 Penyusunan Amdal	1
		9 Dasar-dasar Amdal	1
		10 Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun	2
		11 Pengelolaan limbah plastik (plastik kresek) untuk daur ulang	2
3	Dinas Kepariwisataaan	Teknis	
		1 Diklat keuangan	10
		2 Diklat SKP	2
		3 Diklat barang/jasa	4
		4 Diklat kepegawaian	17
4	Dinas Kesehatan	Teknis	
		1 Diklat penyusunan Renstra OPD	2
		2 Diklat pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU)	1
		3 Diklat penyusunan laporan keuangan (OPD)	1
		4 Diklat pengelolaan keuangan daerah dan proses akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan bendahara pengeluaran	2
		5 Diklat tata cara penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah	1
		6 Diklat administrasi keuangan dan perencanaan bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK dan Bendahara	8

		7	Diklat evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	1
		8	Pelatihan <i>Antenatal Care</i> (ANC)	6
		9	Pelatihan ACLS	4
		10	Pelatihan BCLS	6
		11	Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	6
		12	Pelatihan manajemen Puskesmas	6
		Fungsional		
		1	Diklat jabatan fungsional Dinkes Administrasi Kesehatan	2
		2	Diklat jabatan fungsional Sanitarian Ahli	4
		3	Diklat jabatan fungsional promosi kesehatan ahli	3
		4	Diklat jabatan fungsional nutrisisionis ahli	2
		5	Diklat jabatan fungsional Epidemiologi ahli	2
		6	Diklat jabatan fungsional Bidan Ahli	2
5	Dinas Sosial	Teknis		
		1	Diklat pengadaan barang dan jasa	2
		2	Diklat dan ujian pengadaan barang/jasa pemerintah	2
		3	Diklat teknis penilaian aset/barang daerah	2
		4	Diklat penyusunan SKP	1
		5	Diklat sistem manajemen kinerja PNS dan penilaian kinerja PNS	2
		6	Diklat teknis penyusunan PERDA bagi SKPD	1
		7	Diklat penyusunan Anjab dan ABK	2
		8	Diklat penyusunan Laporan Keuangan	2
		9	Diklat penyusunan RENSTRA	2
		10	Diklat penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) SKPD	1
		Fungsional		
		1	Diklat pengelolaan data PMKS/PSKS	2
		2	Diklat pengelolaan arsip berbasis elektronik	2
		3	Diklat analisis kepegawaian	2
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	Teknis		
		1	Diklat pengadaan barang dan jasa	2
		2	Diklat pengelolaan BMN	2
		3	Diklat perencanaan penganggaran	2
		4	Diklat keuangan	2
		5	Diklat Analisis Jabatan	2
		6	Diklat Manajemen ASN	2
		7	Diklat Kearsipan	2
		8	Diklat Tata Naskah Dinas	2
		9	Diklat Administrasi Kepegawaian	2
		10	Diklat Penyusunan Kerja	2

7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Teknis		
			Bidang Sumber Daya Air	
		1	Perencanaan teknis bendungan	7
		2	Perencanaan teknis embung	5
		3	Perencanaan teknis sungai	5
		4	Perencanaan teknis bangunan pantai	5
		5	Perencanaan teknis air tanah	5
		6	Perencanaan teknis air baku	5
		7	Perencanaan teknis hidrologi dan alokasi air	2
		8	Perencanaan teknis irigasi	2
		9	Pengawasan mutu pelaksanaan pekerjaan irigasi	1
		10	Pengawasan mutu pelaksanaan pekerjaan sungai	1
		11	Pengawasan mutu pelaksanaan pekerjaan bendungan	1
		12	Pengawasan mutu pelaksanaan pekerjaan pantai	1
		13	Pengawasan pelaksanaan air baku tingkat dasar	1
		14	Operasi dan pemeliharaan irigasi	2
		15	Penanggulangan bencana banjir	3
		16	Pengelolaan sumber daya air terpadu (PSDAT)	4
			Bidang Bintek dan Peralatan	
		1	Pelatihan sistem manajemen K3	2
		2	Pelatihan estimasi biaya konstruksi	2
		3	Pelatihan penjamin mutu beton pada pelaksanaan konstruksi jalan/jembatan	2
		4	Perencanaan anggaran	4
			Bidang Cipta Karya	
		1	Pengelolaan pelayanan sistem air limbah setempat-A	1
		2	Pengadaan barang dan jasa pemerintah	2
		3	Pengawasan pekerjaan konstruksi	2
		4	Estimasi biaya konstruksi	2
		5	Pelatihan dasar teknis bidang konstruksi	2
		6	Perencanaan teknis terinsi (DED) SPAM	2
		7	Pengawasan konstruksi SPAM	2
		8	Penyelenggaraan SPAM (Tk. Dasar 2)	2
		9	Pengelolaan teknis pembangunan bangunan gedung negara	2
		10	Bangunan gedung hijau	2
		11	Sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) E-Learning	2
		12	Pengawasan pekerjaan konstruksi	2
		13	Hukum kontrak konstruksi	2
		14	Sistem informasi pemataan untuk pengembangan infrastruktur wilayah	2

		15	Kepemimpinan Tingkat III	1
			Bidang Penataan Ruang	
		1	Pelatihan dasar pemetaan ARC.GIS	5
		2	Tingkat Lanjutan Pemetaan ARC.GIS	3
			Fungsional	
		1	SMK3 Konstruksi (sertifikasi ahli muda K3 Konstruksi	5
		2	Manajemen infrastruktur	5
		3	Manajemen konstruksi	5
			Teknis	
		1	Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama : Substansi OSS	10
		2	Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Lanjutan : Substansi OSS	10
		3	Diklat PTSP di Bidang Penanaman Modal Tingkat Sektoral : Substansi OSS	11
		4	Diklat promosi di Bidang Penanaman Modal	6
		5	Conferences dan discusion	4
		6	Couching and Conseling	1
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	7	Job Rotation Transfer	1
		8	Apprenticehip	1
		9	Job Instruction Training	1
		10	Diklat teknis pengoperasian, pemeliharaan dan pengelolaan PLTS	5
		11	Diklat teknis perencanaan dan pembangunan PLTS terpusat	2
		12	Diklat teknis pemasangan dan pemeliharaan Solar Home Sistem (SHS)	2
		13	Diklat teknis evaluasi perencanaan PLTS terpusat	2
		14	Diklat teknis uji lain operasi PLTS	2
		15	Diklat penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)	2
		16	Diklat optimalisasi penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di Daerah	2
		17	Diklat teknis pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpadu bagi operator dan atau pengelola	2
		18	Bimtek pelayanan terpadu satu pintu Bidang Penanaman Modal (Daya Saing Indonesia dan Kemudahan Berusaha, Perizinan Berusaha)	2
		19	Bimtek Pengelola sistem informasi ketenagakerjaan	2
		20	Diklat sistem online single submission (OSS)	2
		21	Bimtek mekanisme penyusunan rencana strategis perangkat daerah	2

	22	Bimtek pedoman umum penyusunan APBD dan implementasi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah	2
	23	Bimtek pedoman penyusunan dan sinkronisasi RPJD, RPJMD, RENSTRA SKPD dan RKPD terhadap pencapaian percepatan pembangunan daerah dan evaluasi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	2
	24	Bimtek rekonsiliasi dan verifikasi terhadap laporan pertanggung jawaban bendahara SKPD serta tugas dan tanggungjawab bagi bendahara penerima dan bendahara pengeluaran dalam pengelolaan keuangan daerah	2
	25	Bimtek pedoman penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur (SOP) bagi pemerintah daerah	2
	26	Bimtek tatacara penatausahaan dan penyusunan SPJ/LPJ bendahara	2
	27	Bimtek pedoman pengelolaan aset dan inventaris barang milik daerah serta penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah	2
	28	Bimtek penyusunan renstra SKPD dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)	2
	29	Bimtek penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD (RKA-SKPD)	2
	30	Bimtek pengelolaan aset serta tatacara penilaian dan penghapusan aset	2
	31	Bimtek tatacara penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara dalam pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah	2
	32	Bimtek pengelolaan keuangan dan teknik menghadapi audit BPK dalam rangka opini WTP	2
	33	Bimtek pedoman penyusunan SKP	2
	34	Bimtek manajemen arsip dan persuratan berbasis teknologi informasi dan implementasinya pada SKPD dan pemerintah daerah	2
	35	Bimtek tatacara penilaian, penghapusan dan akuntansi aset/BMD menuju opini WTP	2
	36	Bimtek sosialisasi perpres no.16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa dan penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa	2
	37	Bimtek tatacara penyusunan dan penentuan jumlah kebutuhan dan	2

			jenis jabatan PPPK dan PNS pada OPD dan Pemda sesuai anjab dan ABK	
		38	Bimtek implementasi PP No.11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan penyusunan standar teknis kegiatan SKP	2
		39	Diklat Perencana	6
9	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Teknis		
		1	Bimtek Laporan Keuangan	2
		2	Bimtek RENSTRA	2
		3	Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Penilaian Kinerja Pegawai SKP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019	2
		4	Bimtek Kearsipan	2
		5	Bimtek pengembangan kompetensi penyusunan dokumen perencanaan dalam penerapan SPM di daerah	2
10	Satpol PP & Damkar	Teknis		
		1	Diklat penyelamatan (Fire Rescue)	10
		2	Diklatsar Pemadam Tk.I	30
		3	Diklat Inspektur Kebakaran	2
		4	Diklat Investigasi Kebakaran	2
		5	Diklat Teknik Penyuluhan Kebakaran	2
		6	Diklat Penyidik PNS	4
		7	Diklat Manajemen Penyidikan	2
		8	Diklat Intelejen	5
		9	Pembinaan Kelinmasan	50
		10	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	10
		11	Pelatihan manajemen dan juknis Pos Kamdes	40
		12	Pelatihan PBB dan Bela Diri Anggota Linmas	20
		13	Simulasi anggota Sat Linmas dalam penegakan keamanan dan ketertiban saat terjadi bencana	60
		14	Bimtek analisis jabatan bagi PNS	2
		15	Diklat penilaian prestasi kerja PNS dan penyusunan sasaran kerja pegawai	2
		16	Diklat perbendaharaan	2
		17	Diklat Aplikasi Simda Keuangan	2
		18	Diklat aplikasi Simda BUMD	2
		19	Diklat penyusunan Laporan Keuangan	2
		Fungsional		
		1	Diklat Fungsional Satpol PP	30
		2	Diklat Pemadam Kebakaran	30
		3	Diklat PPNS Penegak Perda	6
		4	Diklat Fungsional Pertama	30
11	Inspektorat	Teknis		
		1	Manajemen pengawasan	5
		2	Probity audit	2
		3	Audit pengadaan barang dan jasa	1
		4	Penyusunan kertas kerja audit	2
		5	Audit berbasis resiko	4

		6	Reviu RKA Pemda	4
		7	Audit kinerja Pemda	2
		8	Penilaian Angka Kredit JFA	3
		Fungsional		
		1	Pembentukan auditor ahli	2
		2	Penjenjangan auditor	1
		3	Pembentukan P2UPD Ahli	2
		4	Penjenjangan P2UPD	2
		5	Diklat Fungsional P2UPD Madya	2
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Teknis		
		1	Pengendalian Hama Terpadu pada Tanaman Pangan dan Perkebunan	30
		2	TOT Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan	30
		Fungsional		
		1	Diklat alih kelompok	2
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Diklat pelatihan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK)	25
		2	Diklat petugas registrasi	100
14	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1	Manajemen penanggulangan bencana	5
		2	Pedoman penatausahaan keuangan Pemda	3
		3	Pedoman pengelolaan barang dan aset Pemerintah Daerah dan penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual	3
		4	Pedoman penyusunan LPPD pada SKPD	3
		5	Rencana Kontingensi	3
		6	Penanganan Darurat Bencana	20
		7	Jitupasna	4
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	Diklat Pengenalan Perpustakaan	3
		2	Diklat Kearsipan	3
		3	Diklat manajemen Perpustakaan	3
		4	Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Inspassing	3
		5	Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Inspassing	2
		6	Diklat tata cara penyusunan LAKIP	2
		7	Diklat standar operasional dan prosedur (SOP)	2
		8	Diklat tata cara penyusunan Laporan Keuangan	5
		9	Diklat mengenai penilaian prestasi kerja (PPK) PNS dan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)	5
		10	Diklat standar pelayanan penggajian dan tunjangan kinerja bagi PNS	2
		11	Diklat pengelolaan jabatan fungsional umum	2
		12	Diklat administrasi perkantoran	2
		13	Diklat peningkatan keterampilan serta sikap bagi PNS	2
		14	Diklat penyusunan evaluasi jabatan (EVJAB)	2

		15	Bimtek/Diklat analisis jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)	2
		16	Diklat penyusunan standar kompetensi jabatan	2
		17	Diklat kearsipan administrasi	3
		18	Diklat pengadaan barang dan jasa	2
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1	Diklat Perbanyak Vegetatif Tanaman Perkebunan	30
		2	Diklat pengelolaan tata guna air	30
		3	Diklat pengendalian penyakit pada ternak	30
		4	Diklat Pasca Panen Jambu Mete	30
		5	Diklat pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) sayuran	30
		6	Diklat pengelolaan dan pengembangan minyak kelapa	30
		7	Diklat pengelolaan pakan ternak	30
		8	Diklat Survei Ubinan	12
		9	Diklat pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman pangan dan hortikultura	5
		10	Diklat pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) tanaman perkebunan	5
		11	Diklat Inseminasi Buatan (IB)	5
		12	Diklat pemeriksaan kebuntingan (PKB)	5
		13	Diklat asisten teknis reproduksi (ATR)	5
		14	Diklat paramedis	5
		15	Diklat pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan	20
		16	Diklat penanganan panen dan pasca panen komoditi perkebunan	20
		17	Diklat penyusunan data statistik perkebunan	15
		18	Diklat pengawasan benih tanaman perkebunan	2
17	Bappelitbangda	1	Diklat keuangan daerah	2
		2	Diklat Pengelolaan Keuangan	2
		3	Diklat Pengelolaan Pajak Daerah	2
		4	Diklat Perbendaharaan	2
		5	Diklat Analis Studi Pembangunan	2
		6	Diklat Manajemen Pemerintahan	1
		7	Diklat Manajemen Perencanaan Sosial	1
		8	Diklat Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	2
		9	Diklat tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2
		10	Diklat Pengelolaan dan Analisa Data	2
		11	Diklat Teknis Penyusunan Proposal Penelitian	1

		12	Diklat Teknis Penulisan Ilmiah	1
		13	Diklat Fungsional Peneliti Tingkat Pertama	2
		14	Diklat Dasar-dasar AMDAL	2
		15	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	3
		16	Diklat Perencanaan dan Penyusunan Program Berbasis Kinerja	2
		17	Diklat Analisis Jabatan	2
		18	Diklat Manajemen Kesekretariatan	2
		19	Diklat Kearsipan	2
		20	Diklat Tata Naskah	2
		21	Diklat Kehumasan	2
		22	Diklat LAKIP	2
		23	Diklat Pelayanan Berbasis Elektronik	2
18	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persendian	Teknis		
		1	Diklat Perencanaan dan Penganggaran	1
		2	Diklat Perencana Ahli pertama	1
		3	Diklat Tehnis Pranata Humas Tingkat ahli dan Keterampilan	2
		4	Diklat Ahli Pertam Pranata Komputer	1
		5	Diklat Pelaksana Terampil Komputer	1
		6	Diklat Pranata Siaran	1
		7	Diklat Teknisi Siaran	1
		8	Diklat Statistik Sektoral	2
		9	Diklat Penyusunan Laporan Keuangan	1
		10	Diklat Penatausahaan Keuangan	1
		11	Diklat Sandiman Dasar	1
		12	Diklat Fungsional Sandiman Tk. Terampil	1
		13	Diklat Sandiman Tingkat Ahli	1
		Fungsional		
		1	Diklat Bendahara Daerah	1
		2	Diklat Administrasi Kepegawaian	1
		3	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
		4	Diklat administrasi perkantoran berbasis IT	1
		5	Diklat Perencanaan dalam penerapan SIPD	1
		6	Diklat Penyusunan Laporan Keuangan	1
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Teknis		
		1	Pelatihan Analisis Kelayakan Desa Wisata	
		2	Pelatihan Pengelolaan Wisata Pedesaan Terpadu	
		3	Pelatihan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata	
		4	Pelatihan Standar Perizinan Usaha Pariwisata dan Daftar	

			Usaha Pariwisata (TDUP) bagi Aparat Pemerintah	
		5	Pelatihan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pengelola Destinasi Pariwisata	
		6	Pelatihan Pengemasan Event Pariwisata dan Budaya	
		7	Pelatihan Pengemasan Daya Tarik Wisata	
		8	Pelatihan Strategi Menarik Investasi Pariwisata di Daerah	
		9	Pelatihan Merancang Media Promosi Pariwisata berbasis Video	
		10	Pelatihan Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif	
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	Teknis		
		1	Diklat Tata Cara DP3 dan Sasaran Kinerja Pegawai	
		2	Diklat Penyusunan Anjab, Evjab, ABK	
		3	Diklat Perencanaan	
		4	Diklat Analisis Keuangan	
		5	Diklat Monitor dan Evaluasi	
		6	Diklat Sistem Informasi Geografis	
		7	Diklat Data Base dan Statistik	
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, PAPP,&KB	1	Training Of Fasilitator PUG/PPRG bagi ASN Program di semua OPD	

3.4. **Kebutuhan Kelengkapan Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional**

Kebutuhan terkait perlengkapan diklat, antara lain :

- Alat Tulis Kantor (ATK);
- Alat bantu pembelajaran (Audio Visual);
- Modul Diklat dan sejenisnya;
- Sarana Olahraga;
- Fasilitas Akomodasi;
- Fasilitas Internet;
- Sarana dan Prasarana Diklat Lainnya

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setiap Unit Kerja memiliki karakteristik masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pada level jabatan struktural pun juga memiliki kebutuhan diklat yang dapat diusulkan secara individu sesuai pangkat dan jabatan. Usulan-usulan inilah yang dijadikan sebagai landasan dalam mengidentifikasi kebutuhan diklat.

Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) yang diperoleh dari usulan organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi rekomendasi untuk penyusunan Perencanaan Diklat/Human Capital Development Program (HCDP).

4.2. Saran – saran

1. Diharapkan agar Perencanaan Diklat ini dijadikan pedoman pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi pada Perangkat Daerah;
2. Diharapkan agar Perencanaan Diklat ini menjadi acuan dalam perencanaan anggaran kebutuhan pengembangan pada Perangkat Daerah; dan
3. Diharapkan agar dengan adanya Perencanaan Diklat ini, dapat memberikan solusi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan organisasi.

Malili, 12 Januari 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN LUWU TIMUR,



Dra. ROSMIYATI ALWY, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19650110 198602 2 004